



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 168 /UN26.12/ HK.00.02/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERSONAL IN CHARGE (PIC) DALAM PENYELENGGARAAN  
KELAS KERJA SAMA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG DENGAN BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

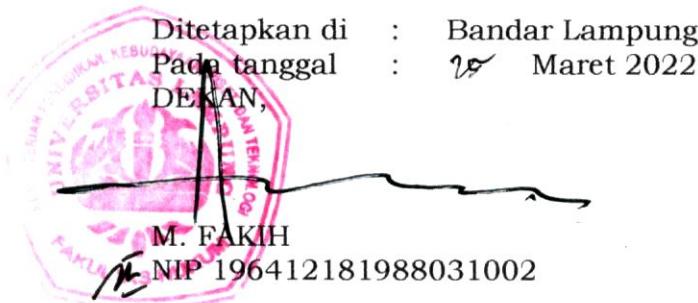
Menimbang : a. Bahwa sejak Tahun Ajaran 2019/2020 telah diselenggarakan Kelas Kerja sama Program Studi Doktor Ilmu Hukum antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja sama Nomor: B-275/I/Is/05/2019 dan Nomor: 3097/UN.26.12/KS/ 2019;  
b. Bahwa pada Tahun Ajaran 2022/2023 kelas kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a akan dilanjutkan dengan angkatan kedua yang akan ditetapkan dengan perjanjian kerja sama berikutnya;  
c. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu mengangkat *Personal in Charge (PIC)*;  
d. Bahwa PIC sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung ;  
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;  
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi dan Kebudayaan Nomor 430/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Hukum Program Doktor Universitas Lampung;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Unila;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung No. 1946/UN26/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Unila.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN *PERSONAL IN CHARGE (PIC)* DALAM PENYELENGGARAAN KELAS KERJA SAMA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG DENGAN BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI;
- KESATU : Mengangkat Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H., NIP 196109301987021001, Pembina/Lektor Kepala; Golongan Ruang IV/a; sebagai PIC Kelas Kerja Sama Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Dengan Badan Diklat Kejaksaan RI;
- KEDUA : PIC bertugas dan bertanggung jawab dalam koordinasi kerja sama dan fasilitasi untuk menunjang kelancaran studi mahasiswa;
- KEDUA : PIC dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi;
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.



Tembusan :

1. Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI di Jakarta.
2. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum.
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip